

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG
DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID
AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Serjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**SULAIMAN
NIM : 11327106406**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAUP-PEKANBARU**

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

ILHAM AKBAR SH, MH

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini berjudul *"PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL-IKHLAS DI PASAR MINGGU KECEMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR"*. Yang di tulis oleh:

Nama	:Sulaiman
Nim	:11327106406
Program Studi	:Ilmu Hukum

Dapat di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2020

Pembimbing skripsi


ILHAM AKBAR, SH,SH,MH
NIP. 130217040

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBAGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”, yang ditulis oleh:

Nama : SULAIMAN
NIM : 11327106406
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Magfirah.MA

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Basir, S.HI., MH

Penguji II
Firdaus, SH., MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.”. Dalam KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak dan perjanjian yang sudah di sepakati tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu perjanjian merupakan ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini terdapat perbuatan wanprestasi yang penulis jumpai pada kegiatan pembangunan masjid. Berdasarkan perjanjian awal yang penulis lakukan adanya perbuatan yang dalam bentuk perjanjian yaitu antara donatur dengan kontraktor atas perjanjian pembangunan masjid al Ikhlas yang berada di pasar Minggu Kecamatan Tapung kabupaten Kampar tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang di buat. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih lanjut peristiwa ini dalam bentuk kajian karya ilmiah mengenai penyelesaian sengketa tersebut.

Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu desa bencha kelubi kecamatan tapung dan bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dialami antara donatur dengan pemborong. Adapun tujuan dari Penelitian ini untuk memberikan sumbangsi terhadap masyarakat dalam penegakan hukum dan juga penulis yang dilakukan dalam bentuk penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber yaitu data Primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat adanya beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembangunan masjid di pasar Minggu Desa Bench Kelubi Kecamatan Tapung kabupaten kampar. Wanprestasi itu sendiri memiliki akibat hukum yang diatur dalam KUHPerdata, pasal 1236, pasal 1237 dan pasal 1266. Akibat hukum dari wanprestasi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko. Sebagaimana telah di jelaskan pihak pertama selaku donatur atau pemberi pekerjaan kepada pihak kedua yaitu selaku kontraktor dan keduanya telah sah melakukan perjanjian dan di tanda tangani bersama. Dan kedua belah pihak menyatakan untuk saling mengikatkan diri untuk pekerjaan pembangunan masjid di Pasar Minggu KM 20 dengan syarat-syarat yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Namun berjalannya perjanjian tersebut menimbulkan adanya suatu akibat hukum karena tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat, salah satunya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan. Upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara tersebut dimana pihak pertama memberikan teguran terhadap pihak kedua, dalam hal ini pihak kedua akan melanjutkan dan mengganti kerugian tersebut, namun berjalannya waktu pihak kedua tidak juga melakukan hal ini. Maka diambil tindakan untuk melakukan musyawarah dan mufakat dalam perkara ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, ridho, dan petunjuk Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PEYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata-1 pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Ayahanda Rafik (Alm) Ibunda Normah dengan sepenuh cinta dan kasih sayangnya telah berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran serta doa yang tak pernah lelah dalam mendidik. Cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis dari kecil hingga sekarang. Dan ayahanda yang tercinta terimah kasih atas jasa-jasanya yang telah membesarkan dan mendidik sampai dewasa, hingga waktulah yg akan menghentikan segalanya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad mujahidin, S.Ag.,M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. Sunandar, MCL. Selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag. Selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. Selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kegiatan penelitian ini Serta Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ilham Akbar, SHI, SH, MH. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan ilmu serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini.
7. Ibu Hj.Nurani Sahu. SH.,MH. Selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan motivasi bantuan serta dorongan kepada penulis selama penulis masih duduk di bangku kuliah
8. Seluruh karyawan dan karyawan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil serta keluarga besar FIS (future islamic school) yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

10. Sahabat dan teman yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini Dan Semua pihak yang memberikan motivasi dan dorongan yang tidak dapat penulis balas, melainkan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya.

Semua pihak yang telah berjasa di atas penulis mendoakan semoga ALLAH SWT membalas dengan balasan yang setimpal dan menjadi amal sholeh. Amiiinn yaa Robbal Alamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan dalam skripsi ini masih banyak kurang dan mash jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu maka penulis mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam penulisan ataupun penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 21 Februari 2020

Penulis

SULAIMAN
11327106406

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Kabupaten Kampar.....	15
B. Desa Bencah Kelubi.....	18
C. Sosial Ekonomi Masyarakat	27
D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya	29
E. Seni Budaya	29
F. Sistem Perkawinan.....	30

BAB III TINJAUAN FUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian	32
B. Pembagian Dalam Perjanjian Pemborongan.....	41
C. Jenis-jenis Perjanjian Pemborongan	50
D. Asas-asas Perjanjian	52
E. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	56
F. Wanprestasi.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian kerja Antara Pemborong Dengan Donatur Pada Pembangunan Masjid Al Ikhlas di Pasar Minggu kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	63
1. Penanda Tanganan Perjanjian.....	64
2. Jangka Waktu Pekerjaan	65
3. Biaya Pembangunan dan Prosedur Pembayaran.....	67
4. Masa Pemeliharaan	69
B. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi antara Pemborong dengan Donatur pada Pembangunan Masjid al Ikhlas di Pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar	71
1. Dilakukan Teguran Oleh Donatur.....	72
2. Diselesaikan Melalui Musyawarah	7
3.	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL.I.1	: POPULASI DAN SAMPEL	9
TABEL.II.1	: JUMLAH RW DAN RT DESA BENCAH KELUBI.....	20
TABEL.II.2	: JUMLAH PENDUDUK DESA BENCAH KELUBI MENURUT JENIS KELAMIN	21
TABEL.II.3	: JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA	22
TABEL.II.4	: JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT UMUR.....	23
TABEL.II.5	: TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA BENCAH KELUBI.....	24
TABEL.II.6	: SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI DESA BENCAH KELUBI	25
TABEL.II.7	: JUMLAH PENDUDUK DESA BENCAH KELUBI MENURUT AGAMA	26
TABEL.II.8	: SARANA IBADAH DESA BENCAH KELUBI.....	26
TABEL.II.9	: JUMLAH PENDUDUK BERDASRKAN MATA PENCAHARIAN..	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang sudah disepakati tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu kedua belah pihak harus menepati dan melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Di samping itu, perjanjian juga merupakan suatu rangkaian kesepakatan dimana salah satu pihak apabila melanggar kesepakatan tersebut akan memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari perjanjian tersebut, dan dalam aturan hukum, pelaksanaan dari perjanjian tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.¹ Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313, menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan ikatan yang dibuat oleh dua pihak, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2002), h.9

²*Ibid.*

bagi mereka, bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.³

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi perjanjian, yaitu:

- Memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu;
- Tidak berbuat sesuatu.

Selanjutnya dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nya atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang-piutang dan sebagainya.⁴

Dalam hal perjanjian memberikan sesuatu, maka masing-masing pihak harus menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban atas sesuatu benda yang diterimanya. Hak dan kewajiban tersebut harus seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian juga halnya dengan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten kampar. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 isi perjanjian kerja bahwa, pihak pertama memberikan tugas pada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu yang berlokasi di kecamatan Tapung kabupaten Kampar, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.3

⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.202



spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam pasal 2 sesuai perjanjian kerja sama antara Donatur dengan pemborong dijelaskan bahwa, “Pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 tersebut, dimulai pada bulan Maret tahun 2018, dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Dalam pasal 3 perjanjian kerja disebutkan bahwa:

1. Pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama.
2. Pihak kedua harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja (bestek) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
3. Pihak pertama harus memberikan detail spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB.
4. Pihak pertama harus memberikan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut di atas merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu perjanjian. Hal ini merupakan aman atau undang-undang yang harus diikuti oleh kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu sudah sewajarnya kedua belah pihak mengikuti dan mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Apabila salah satu pihak tidak mengikuti apa yang sudah disepakati tersebut, maka ia telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Di samping itu pihak lain dapat menuntut ganti rugi akibat perbuatan salah satu pihak tersebut.

Pihak kedua dikatakan wanprestasi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Dalam pekerjaan pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu pihak kedua tidak dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pemborong dengan donatur, karena dalam pengerjaan tersebut pemborong atau pihak kedua terlambat menyelesaikan pekerjaan tersebut, yang seharusnya selesai pada bula Juni, tetapi kenyataannya sampai penelitian ini dilakukan belum selesai. Di samping itu juga ada bagian-bagian dari bangunan masjid tersebut tidak sesuai gambar atau spesifikasi yang sudah ditentukan, dan juga ada yang retak-retak dan rusak.

Dari kenyataan yang terjadi tersebut jelas bahwa, pemborong atau pihak kedua tidak dapat melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama, dan kepada pihak kedua tersebut sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), h.45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pembangunan masjid yang sudah disanggupi oleh pihak pemborong tidak dapat diselesaikan dengan sempurna, dengan kata lain pemborong sudah melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu, spesifikasi dan kualitas bangunan tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh mengenai masalah ini dalam suatu penelitian yang berbentuk skripsi, dengan mengambil judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini agar skripsi ini mengarah pada pokok pembahasan dan tidak menyimpang dari judul serta tujuan penelitian maka penulis membatasi permasalahan pada sejauh mana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian antara pemborong dengan donatur pada pembangunan Masjid Al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid Al Ikhlas di Pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar.
 - b. Dan Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 1. Manfaat teoritis, yakni berguna untuk pengembangan dan pengkajian hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.
 2. Manfaat praktis, yakni berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian pada masa yang akan datang. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi perkembangan pemikiran bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya menyangkut perjanjian kerja sama.
 3. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak donator dan pemborong, dan pedoman untuk kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Dalam penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Sehubungan dengan itu maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,⁷ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar.

Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada pasar Minggu desa bencah kelubi kecamatan Tapung, dimana pembangunan masjid Al Ikhlas dilakukan yang terletak di Pasar Minggu desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa ada di jumpai penyimpangan dalam pembangunan masjid tersebut, karena tidak selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

⁷*Ibid*, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifikasi yang berbeda dengan gambar, serta ada bagian dari bangunan tersebut yang rusak. Sehingga perlu dilihat bagaimana penyelesaian perselisihan tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah donatur dan pemborong dalam pembangunan masjid di pasar Minggu. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perjanjian kerja atas pembangunan masjid di pasar Minggu Kecamatan Tapung kabupaten Kampar.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁸ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian yaitu borongan pembangunan masjid Al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,⁹ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

⁹ *Ibid*, h.30

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁰ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa serta pihak donatur sebanyak 1 orang, pemborong sebanyak 1 orang, pekerja sebanyak 5 orang, serta tokoh masyarakat dan ketua RT masing-masing 1 orang. Oleh karena populasi jumlahnya tidak terlalu besar, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERESENTASE	KETERANGAN
1	DONATUR	1	1	100%	
2	PEMBORONG	1	1	100%	
3	PEKERJA	5	5	100%	
4	KEPALA DESA	1	1	100%	
5	TOKOH MASYARAKAT	1	1	100%	
6	KETUA RT	1	1	100%	
	JUMLAH	10	10	100%	

Sumber: Data lapangan, 2018.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹¹*Ibid*, h.119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹² Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu donatur, pemborong, pekerja, dan Ketua RT.

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid di Pasar Minggu Kecamatan Tapung, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil

¹²Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

¹³Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁴

8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum kabupaten Kampar, kecamatan Tapung, desa Bencah Kelubi dan adat istiadat.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian, wanprestasi, bentuk-bentuk, dan pihak-pihak pemborong.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid al Ikhlas di pasar Minggu kecamatan Tapung kabupaten Kampar, serta penyelesaian perselisihan antara pemborong dengan donatur.

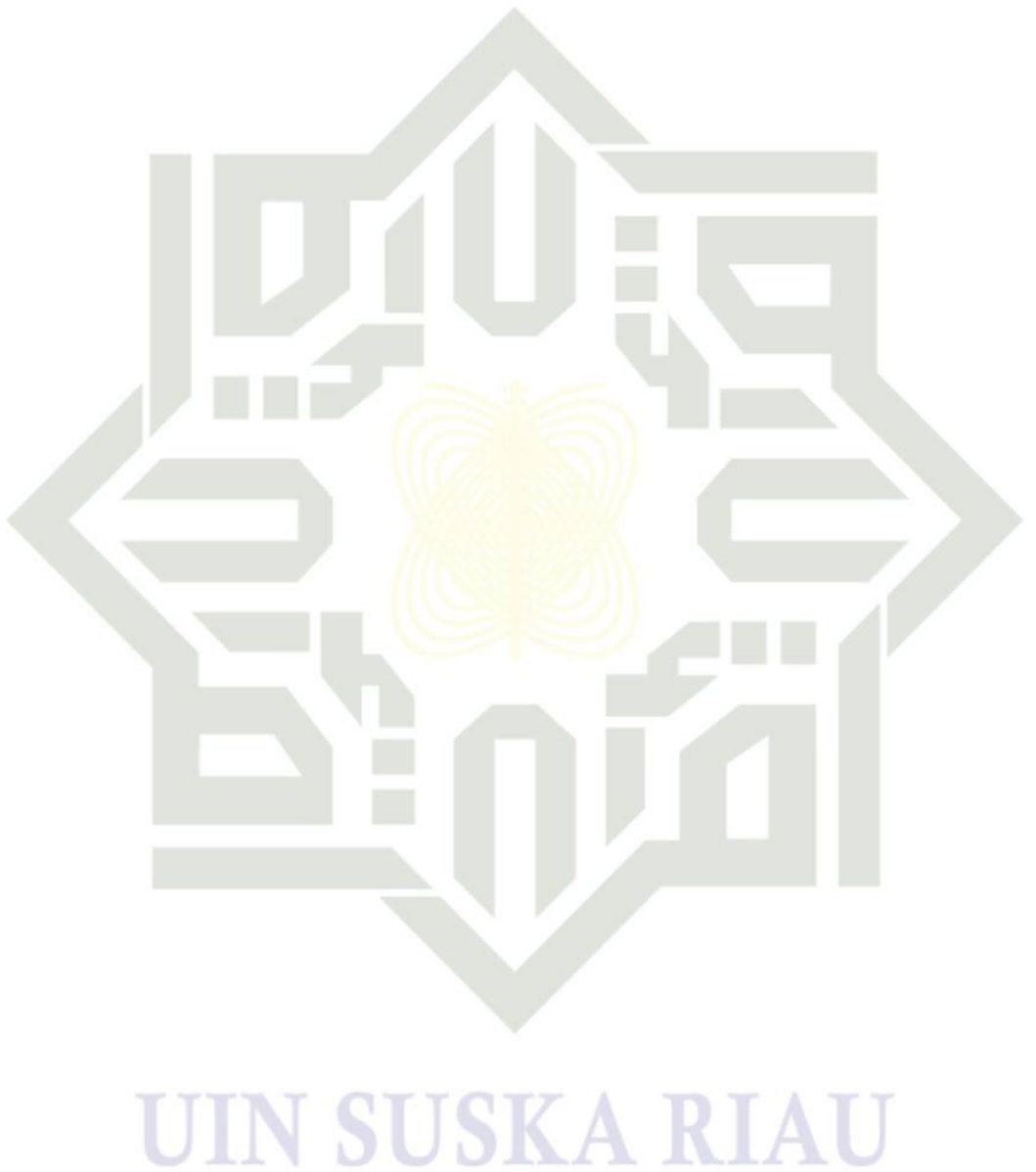
¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Dan Letak Geografis Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan gubernur militer Sumatera Tengah nomor 16/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Riau terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956¹⁵ Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada Tahun 1949 sampai Tahun 2009, sudah 21 (dua puluh satu) kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah, sampai jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S) Ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota provinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga sudah menjadi kotamadya.

¹⁵ Undang-undang RI nomor 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.¹⁶

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 6 Tahun 1995, kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 105 Tahun 1994 di kabupaten Kampar dibentuk 23 dinas daerah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 hanya terdapat 5 dinas (dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah kabupaten/kota yang baru di provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah pemerintahan, yaitu:

¹⁶ Kampar dalam Angka Tahun 2015, h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang meliputi 153 Desa dan 8 (delapan) kelurahan dengan ibu kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 (empat) kecamatan meliputi 81 (delapan puluh satu) Desa dan 4 (empat) kelurahan dengan ibu kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan meliputi 89 (delapan puluh sembilan) desa dan 6 (enam) kelurahan dengan ibu kota Pasir Pengaraian.¹⁷

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 11.289,28 Ha. Batas-batas

daerah Kabupaten kampar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu dan provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak.

Di daerah kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa

sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya lebih kurang 413,4 Km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m, dengan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang meliputi kecamatan

¹⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

- b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya lebih kurang 90 Km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di kabupaten Kampar sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Curah hujan tertinggi selama Tahun 2014 terjadi di Kecamatan Koto Kampar Hulu, pada bulan November dengan ketinggian curah hujan yang mencapai 969 mm, sedangkan jumlah hari hujan yang terbanyak adalah di kecamatan Kampar Utara.

B. Desa Bencah Kelubi

1. Sejarah Dan Letak Wilayah

Desa Bencah Kelubi merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tapung kabupaten Kampar provinsi Riau. Desa Bencah Kelubi berdiri pada tahun 2005, desa ini merupakan sebuah desa yang berasal dari pemekaran Desa Pantai Cermin. Desa Pantai Cermin ini dulunya memiliki wilayah yang luas. Seiring berjalannya waktu desa Pantai Cermin mekar menjadi beberapa desa. Di antaranya desa Karya Indah, desa Bencah Kelubi, dan desa Pantai Cermin. Desa Karya Indah mekar pada tahun 2000, sedangkan desa Bencah Kelubi ini sendiri mengalami pemekaran pada tahun 2005.

Asal kata Bencah Kelubi itu sendiri memiliki arti yaitu: Bencah= Boncah= Bawa-rawa. Sedangkan Kelubi itu sendiri konon berasal dari nama buah-buahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki rasa keasam-asaman.¹⁸ Desa Bencah Kelubi sebagai mana desa lainnya terletak di kecamatan Tapung yang letak desanya berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Karya Indah
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sei. Putih
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pancuran Gading
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pantai Cermin

Adapun luas desa Bencah Kelubi adalah 17.200 ha yang terdiri dari luas kebun 5.500 ha, Luas pemukiman 35 ha, Tanah yang bersertifikat 240 ha, tanah yang belum bersertifikat 11.425 ha. Sedangkan Jarak Desa Bencah Kelubi dengan pemerintahan kecamatan, kabupaten, serta dengan ibu kota provinsi adalah sebagai berikut:

1. Jarak desa Bencah Kelubi dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 25 KM.
2. Jarak desa Bencah Kelubi dengan pusat pemerintahan kabupaten adalah 55 KM atau lebih kurang 2 jam.
3. Sedangkan jarak desa Bencah Kelubi dengan pusat pemerintahan provinsi adalah 12 K M atau lebih kurang 1,5 jam.

Dengan demikian desa Bencah Kelubi luas wilayahnya semenjak ditempati hingga sekarang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, dari perbatasan-perbatasan dengan desa lain hingga tanah pertanian, perkebunan.

Desa Bencah Kelubi yang luas wilayahnya lebih kurang 17.200 ha,

¹⁸ Wawancara, 10 September 2018 dengan Yusmar (KADES Bencah Kelubi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki iklim sedang karena terletak di daratan rendah. Sedangkan musim yang terjadi di desa Bencah Kelubi ada 2 (dua) yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Desa Bencah Kelubi mempunyai empat(4) dusun yaitu:

1. Dusun I
2. Dusun II
3. Dusun III
4. Dusun IV

Masing-masing dusun di pimpin oleh seorang kepala dusun, yang pengangkatannya dilakukan cara pemilihan berdasarkan suara terbanyak dalam wilayah kerja dusun masing-masing. Sebagaimana biasanya setiap desa memiliki daerah bagian RW dan RT, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 1

JUMLAH RW DAN RT DESA BENCAH KELUBI

No	Nama Daerah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun I	2 RW (01, 02)	5 RT
2	Dusun II	2 RW (03, 04)	6 RT
3	Dusun III	2 RW (05, 06)	6 RT
4	Dusun IV	2 RW (07, 08)	3 RT
Jumlah		8 RW	20 RT

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018)

Pembagian daerah di atas mencakup daerah seluas 17.200 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2840 jiwa atau 710 KK. Data yang diperoleh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor kepala desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung tahun 2014 berjumlah 2840

jiwa yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 1278
2. Perempuan : 1562

Jumlah penduduk desa Bencah Kelubi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 2
JUMLAH PENDUDUK DESA BENCAH KELUBI
MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1278	45,54 %
2	Perempuan	1562	54,46 %
Jumlah		2840	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapatlah diketahui bahwa penduduk yang terbanyak adalah jenis kelamin perempuan yaitu 1562 jiwa, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1278 jiwa. Penduduk desa Bencah Kelubi terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku melayu, suku jawa, suku batak, suku minang, dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA

No	Jenis Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1	Suku Melayu	895	31,51 %
2	Suku Batak	513	18,06%
3	Suku Jawa	864	30,43%
4	Suku Minang	568	20%
Jumlah		2840	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapatlah diketahui masyarakat yang ada di desa Bencah Kelubi merupakan masyarakat yang multi etnis. Ini terlihat dari beragam suku bangsa yang terdapat dalam masyarakat yang ada di daerah tersebut. Diantara suku-suku yang ada di desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar tersebut mempunyai adat istiadat tersendiri dalam masing masing suku, seperti dalam acara keramaian tiap-tiap suku menampilkan kesenian sukunya sendiri.¹⁹

Kebanyakan dari jumlah penduduk desa Bencah Kelubi adalah suku melayu yang terdiri dari masyarakat asli desa Bencah Kelubi, kemudian disusul suku jawa, batak, minang, dan lain-lain. Masyarakat desa Bencah Kelubi pada umumnya adalah nelayan, petani, dan berkebun. Nelayan dan bertani merupakan penghasilan pokok masyarakat, sedangkan penghasilan lain merupakan penghasilan tambahan. Sementara itu, kondisi penduduk desa Bencah Kelubi

¹⁹ Soejono Soekanto, *Soiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 194.

menurut tingkat umur tidak terlalu mempengaruhi terhadap pertumbuhan penduduk. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 4

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT UMUR

No	Tingkat Umur/Tahun	Jumlah	Persentase
1	0-4	201	7,08%
2	5-9	310	10,92%
3	10-14	398	14,01%
4	15-19	417	14,68%
5	20-24	193	6,80%
6	25-29	318	11,20%
7	30-34	254	8,94%
8	35-39	205	7,22%
9	40-44	215	7,57%
10	45 Keatas	329	11,58
Jumlah		2840	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Dari Tabel di atas terlihat bahwa penduduk desa Bencah Kelubi banyak dari kalangan usia yang masih produktif antara usia 15 tahun hingga usia 44 tahun melebihi setengah dari jumlah keseluruhannya. Sehingga dengan demikian penduduk yang masih digolongkan usia produktif terdapat 1602 orang atau 56,40% dari jumlah mereka. Mereka sudah mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan dapat menghidupkan orang lain, hal ini terbukti masih banyak yang bekerja baik diluar atau pun didalam daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang mutlak yang harus diterima oleh setiap manusia karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya di bidang pendidikan desa Becah Kelubi sangat memadai. Karena kebanyakan masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Agar pendidikan berjalan dengan baik, maka diperlukan sarana pendidikan, guna menunjang manusia yang berkualitas tersebut yaitu melalui pendidikan di sekolah. Untuk itu masyarakat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung ini telah banyak menyekolahkan anak-anak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 5

TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA BENCAH KELUBI

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Buta Aksara	12	0,42 %
2	Belum Sekolah	278	9,79 %
3	Tidak Tamat SD	289	10,18%
4	Tamat SD	988	34,79 %
5	SLTP/Sederajat	789	27,78 %
6	SMU/Sederajat	413	14,52 %
7	Perguruan Tinggi	71	2,5 %
Jumlah		2840	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. Sistem pengajaran nasional tersebut terkenal dengan sebutan lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di desa Bencah Kelubi adalah sesuai dengan tabel berikut:

TABEL II. 6
SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI DESA BENCAH KELUBI

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah	Kondisi
1	Madrasah Diniyah Awaliyah	3 buah	Baik
2	Taman Kanak-kanak	2 Buah	Baik
3	Sekolah Dasar	2 Buah	Baik
4	SLTP/Sederajat	1 Buah	Baik
5	SLTA/Sederajat	2 Buah	Baik
Jumlah		10 Buah	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang terdapat di desa Bencah Kelubi sudah memadai, jadi bagi anak-anak yang telah lulus SLTA yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi baru lah mereka pergi ke kota provinsi atau kabupaten.

Sedangkan lembaga non formal juga terdapat di desa Bencah Kelubi seperti pengajian al-Qur'an yang biasanya dilakukan di Musholla, Masjid dan di rumah-rumah penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengajar al-Qur'an yang dilaksanakan pada waktu malam hari setelah sholat magrib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kehidupan Beragama

Penduduk desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 7
JUMLAH PENDUDUK DESA BENCAH KELUBI
MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2806	98,90%
2	Keristen	30	1,06%
3	Hindu	-	-
4	Budha	- 4	0,14%
Jumlah		2840	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa warga desa Bencah Kelubi mayoritas beragama Islam atau 98,80 % dan kemudian beragama kristen yaitu 1,06 %. Selanjutnya beragama Budha 0,14 %. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 8
SARANA IBADAH DESA BENCAH KELUBI

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushallah	9
3	Gereja	1
Jumlah		14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah Masjid ada 4 buah dan Mushallah ada 9 buah yang dipergunakan sebagai tempat pengembangan agama Islam, terutama Masjid selain untuk sholat juga dipakai oleh pemuda/pemudi atau remaja sebagai tempat untuk mempelajari agama yang diadakan sebulan sekali secara rutin dan bergantian.

Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar rasa sosial yang terbentuk akibat ikatan emosional sosial yang tinggi, saling memerlukan dan rasa akibat nasib yang sama yang terlihat pada kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan peribahasa yang mengatakan "berat sama di pikul ringan sama di jinjing". Soerjono soekanto mengatakan, ciri-ciri masyarakat yang memiliki rasa sosial sebagai berikut:

- a. Seperasaan, yaitu seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebanyak mungkin ke dalam suatu kelompok tertentu, sehingga dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Segala keperluannya diselaraskan dengan keperluan kelompoknya sebagai struktur sosial masyarakat.
- Saling memerlukan, yaitu mempunyai ikatan antara individu dengan individu yang lain, sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara kelompok tersebut.
- Sepenanggungan, yaitu apapun yang terjadi dengan masyarakat tersebut, mereka berada dalam satu kelompok sehingga mereka merasa mempunyai kedudukan yang pasti. Dalam kehidupan ekonomi secara umum masyarakat bekerja dibidang pertanian di samping itu ada juga yang bekerja di bidang tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II. 9
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA
PENCARIAN

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/Nelayan	15	1,14%
2	PNS		
3	TNI/POLRI	2	0,14%
4	Buruh Tani	209	14,10%
5	Pengusaha Perahu		0%
6	Pengrajin Tempe	20	1,4%
7	Pengrajin Tahu		0%
8	Bengkel Mobil	-9	0,64%
9	Bengkel Sepeda Motor	11	0,78%
10	Bengkel Sepeda	1	0,7%
11	LAS	3	0,21%
12	Wirawasta		0%
13	Pedagang	284	20,20%
Jumlah		1406	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2013

Dari tabel di atas dilihat bahwa pekerjaan penduduk desa Bencah Kelubi adalah kebanyakan nelayan/petani. Kemudian dari seluruh penduduk yaitu 1406 jiwa dapat dilihat pada tabel, bahwa hampir sepenuhnya bekerja, tetapi sesungguhnya kebanyakan dari mereka sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sedangkan sebagian lagi masih anak-anak masih menuntut ilmu di daerah atau diluar daerahnya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat di desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar yang mempunyai bermacam-macam suku dan budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung kabupaten Kampar hidup dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, jarang terjadi pembenturan dan tidak pernah terjadi kejadian anarkis antara sesama suku tersebut.²⁰

E. Seni budaya

Terdapat beberapa seni budaya yang masih dimiliki dan masih kental sampai hari ini oleh masyarakat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung, diantaranya:

a. Calempong

Jenis musik yang sangat populer milik kampar adalah calempong. Dalam dialek ocu disebut *calempong baoguong* atau *gondang baoguong*. Dari beberapa sumber calempong berasal dari musik perkusi yg terbuat dari kayu (jenis gambang) dengan iringan bunyi bass dari tali rotan yg diregang

²⁰ Wawancara dengan zulkifli di Desa Bencah Kelubi, 05 Mei 2015

atas tanah. Bunyi gendang (ketepak) terbuat dari kayu yg ditebuk pada. Calempoong terbuat dari logam berjumlah 6 buah disusun dengan deretan nada tinggi ketengah pada sebuah kotak berukir yang terbuat dari kayu.

G. Gubano

Seni Gubano atau sering disebut *dikiu gubano* biasanya diadakan pada acara adat pernikahan. Umumnya saat ini pemainnya sudah usia lanjut, Seni Gubano merupakan gubahan yang dinyanyikan yang diiringi dengan alat yang disebut Gubano. Dikiu gubano termasuk musik tradisi gabungan vokal dan instrumental. Instrumental yang digunakan adalah gubano (rebana besar). Jumlah pemainnya antara 5 hingga 10 atau 12 orang. Penabuh gubano merangkap sebagai penyanyi berzanji dengan membaca buku syair berzanji.

F. Sistim Perkawinan

Kebiasaan di desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung ini, tata cara pernikahan biasanya dimulai dengan datangnya keluarga pihak laki laki kerumah keluarga pihak perempuan untuk menanyakan kepada orang tuanya apakah mereka setuju anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki yang di walikannya. Seandainya mereka setuju, dihari kemudian baru akan di adakan tunangan. Pada acara tunangan, biasanya dihadiri oleh anggota keluarga dan beberapa orang teman sebagai saksi dan diikuti dengan tukar cincin. Kebiasaan di desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung ini, dalam melaksanakan walimahan/pesta menerapkan sistem gotong royong. Dan biasanya jauh-jauh hari sebelumnya di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuklah panitia acara agar acara dapat berjalan lancar dan dilanjutkan dengan kostong royong mempersiapkan segala sesuatunya seperti mendirikan tenda, pelaminan dan lain sebagainya.

Desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung penduduknya terdiri dari beberapa suku, adat pesta yang diterapkan biasanya sesuai dengan adat mereka masing-masing. Maksudnya kalau penduduk suku jawa menggunakan adat jawa, dan penduduk suku melayu menggunakan adat melayu. Apabila terjadi pernikahan campuran, maka adat yang dipakai adalah adat yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perjanjian

1. perjanjian

Kata perjanjian berasal dari terjemahan *overeenkomst* yang diterjemahkan dengan istilah perjanjian maupun persetujuan. Didalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan sebagai kontrak adalah sebagai berikut: *An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do to particular thing*” Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih , dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu secara sebagian.²¹

Dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikendaki oleh pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau

²¹Salim .H.S. Hukum Kontrak,*Op.Cit.* h.26

kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²²

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Disini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing – masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan – persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik.²³

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, menghilangkan hubungan hukum. Disamping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut,

²² Salim H.S, *Op Cit*, h.4

²³ Pustaka Mahardika *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.²⁴ Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (pasal 1313), menyatakan bahwa suatu kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.²⁵

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku ketiga kitab undang – undang hukum perdata dengan judul perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang luas dari kata perjanjian. Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan sebab perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan selain undang – undang.

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak mulai

²⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti,2002), h.9

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h3

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Masa, 1992), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari saat hubungan hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja.²⁷

Menurut Pasal 1601 a KUH Perdata Perjanjian kerja (*Arbeidsoverenkoms*), adalah :

“Perjanjian kerja adalah : suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak”.

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.²⁸

Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

²⁷ Libertus Jehani, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, (Jakarta: Forum Sahabat,2008), h. 2

²⁸ Penjelasan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁹

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu/buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.³⁰

Pengertian tentang perjanjian kerja yaitu : Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (dierstverhanding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.³¹

Dalam penulisan skripsi ini digunakan secara bersama-sama atau secara bergantian masing-masing istilah “konstruksi” dan “pemborongan” . sungguhpun barangkali jika dikaji-kaji ada perbedaan diantara dikedua istilah tersebut. Tetapi teori dan praktek hukum, kedua istilah tersebut dianggap sama , terutama jika dikaitkan dengan istilah “hukum/kontrak konstruksi “ atau “hukum kontrak pemborongan”. Karena itu , dalam tulisan ini, kedua istilah tersebut digunakan untuk arti yang sama. Walaupun begitu , sebenarnya istilah “pemborongan” mempunyai cakupan yang lebih luas dengan istilah “konstruksi” . sebab dengan istilah “pemborongan” dapat saja berarti bahwa yang diborong tersebut bukan

²⁹ Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (PT. Raja Grafindo persada, 2001), h. 36

³¹ Djumadi, *Opcit*, h. 30

oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak dilarang oleh undang undang , tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan.³²

Karena ketentuan dalam KUHPerdata yang menyangkut perjanjian melakukan pekerjaan melakukan pekerjaan, khususnya mengenai pemborongan ini hanya memuat beberapa ketentuan saja mengenai hak-hak dan kewajiban parapihak dalam pemborongan, maka banyak hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan pemborongan lalu diatur dalam peraturan standar sebagaimana yangtercantum dalam AV (*Algemene Voorwaarden Voor De Uitvoering BijAnnmening Van Openbare Weerkween In Indonesia*) tahun 1941 tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia. Kemudian hal ini diatur pula dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Perpres No. 35 tahun 2011 dan Perpres No. 70 tahun 2012. Lahir undang-undang ini sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan iklim usaha, yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal dalam rangka tercapainya pembangunan nasional.

³² Djumialdji, *Op.cit.* h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perjanjian pemborongan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dikenal dengan istilah jasa pemborongan. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perancangan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sedangkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terjadi perubahan nama jasa pemborongan menjadi pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Perubahan nama ini dilakukan agar sejalan dengan *International Best Practice*.³³

Kontrak kerja konstruksi atau kontrak pemborongan meliputi tiga (3) bidang pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada prinsipnya, pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh penyedia jasa secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi/pemborongan. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian tidak dibenarkan adanya perangkapan fungsi, misalnya pelaksanaan konstruksi merangkap konsultan pengawas atau konsultan perencana merangkap pengawas. Pengecualian terhadap prinsip ini dimungkinkan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta mengandung resiko

³³ Khalid Mustafa, "Matriks Perbedaan Antara Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 Perubahan Pertama", Perpres No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua, <http://lpse.palembang.go.id/eproc/index....download/31303631323235313b31>, diakses pada 12 September 2018.

besar, seperti pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik dan reaktor nuklir.³⁴

Menurut Wikipedia ensiklopedia, konstruksi diartikan sebagai suatu kegiatan Pembangunan sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai sebuah bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.³⁵

Pesatnya dinamika pembangunan nasional terutama dibidang fisik, harus pula didukung dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha jasa konstruksi nasional yang handal dan profesional, diharapkan dapat menggairahkan iklim usaha yang kompetitif dan berdaya saing sekaligus juga dapat memaksimalkan penggunaan jasa produksi nasional oleh para pengguna jasa konstruksi nasional, maka secara tidak langsung telah mendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan usaha devisa negara, serta memberikan lapangan usaha dan kesempatan kerja.³⁶

Di dalam UU No. 18 Tahun 1999 terdapat asas-asas pengaturan jasa konstruksi atau pemborongan, yaitu :³⁷

³⁴Y. Sogar Simamora. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Kantor Hukum "Wins & Partners". Cetakan kedua. 2013.h. 24.

³⁵Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana. *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Aneka Ilmu, 2010. h.15.

³⁶Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana. *Op.Cit.* h.15.

³⁷*Ibid.*h.16-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas kemitraan, yang mengandung pengertian bahwa sesuatu yang diharapkan dapat diwujudkan dengan keterkaitan yang makin erat dalam satu kebaikan baik, antara pengguna jasa dengan penyedia jasa ataupun sebaliknya.

Asas kejujuran dan keadilan, yang mengandung pengertian kesadaraan akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional .

4. Asas keserasian , yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan pemborongan harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan jasa wajib memenuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan disisi lain dapat memberikan terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan disisi kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Asas kemandirian , yang mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Asas keterbukaan, yang mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat menghindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Asas kemanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

B. Pembagian Dalam Perjanjian Pemborongan

Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian pemborongan bangunan merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu (kontraktor) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yang memborongkan (*aanbesteder*, pemberi tugas) dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dalam pemborongan bangunan, disamping pihak yang memborongkan/ pemberi tugas (*bouwheer, principal*) dan pihak pemborong (kontraktor, *aanmener*), dapat juga turut serta pihak-pihak lain, seperti : tenaga ahli (arsitek) yaitu perancang, perencana, penaksir biaya, pekerja bangunan, dan pengawas pekerja bangunan.³⁸

Berbeda dengan perjanjian-perjanjian khusus lainnya, perjanjian pemborongan bangunan mengenal selera para pihak dalam perjanjian, yang mengenal personalia/ peserta perjanjian yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

³⁸ *Ibid.*

perjanjian.³⁹ mengenai pihak-pihak yang langsung terkait dalam perjanjian pemborongan itu disebut peserta dalam perjanjian pemborongan yang terdiri dari unsur-unsur :⁴⁰

1. Yang memborongkan (*bouwheer/ aanbestede*/ kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek / pemberi tugas) ;

2. Pemborong (*rekanan, aanmener, contractor*) ;

3. Perencana (*arsitek*) ;

4. Pengawas (*Direksi*).

1. Yang Memborongkan (*bouwheer/ aanbestede*/ kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek / pemberi tugas)

Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat – syarat . dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjanjian kerja.⁴¹

Hubungan Hukum antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong diatur sebagai berikut :⁴²

a. Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pemerintah, maka hubungan keduanya adalah hubungan kedinasan.

³⁹Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian PemboronganPembangunan* ,Yogyakarta : Liberty. 1982, h.65.

⁴⁰Djumialdji, *Op.Cit*, h.23.

⁴¹Sri Soedewi Masjchun Sofwan.*Op. Cit*, h.68.

⁴²Djumialdji, *Op.Cit*, h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila yang memborongkan pihak pemerintah sedangkan pihak pemborongnya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta dibawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja/kontrak.

Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta dibawah tangan , Surat Perintah Kerja (SPK) , Surat Perjanjian Pemborongan /kontrak.

Dalam Pasal 12 Perpres No. 54 Tahun 2010 , disebutkan bahwa pihak yang memborongkan /pengguna jasa (dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen) harus memenuhi persyaratan, yakni :⁴³

- a. Memiliki integritas ;
- b. Memiliki disiplin tinggi;
- c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta menajerial untuk melaksanakan tugas;
- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku , serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. Menandatangani Pakta Integritas ;
- f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan ; dan
- g. Memiliki Sertifikat keahlian Pengadaan Barang /Jasa.

⁴³ Pasal 12 Perpres No.54 Tahun 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang menjadi tugas pihak yang memborongkan (pengguna jasa) terdapat dalam pasal 8 dan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 yakni sebagai berikut :⁴⁴

- a. Menyusun perencanaan pengadaan jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan jasa kepada pimpinan instansinya ;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan jasa dan aset lainnya kepada menteri, Panglima TNI/Kepala Polri, Pimpinan Lembaga. Gubernur,Bupati/Walikota,

⁴⁴Marthen H Toelle. *Disharmoni Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah di Indonesia*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h.90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Gubernur BI, Pimpinan BUMN, Direksi, BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

- k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa dimulai;
- l. Pengguna jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;
- m. Pengguna jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan jasa yang dilaksanakan.

2. Pemborong (rekanan, *aanmener*, *contractor*)

Pemborong adalah pihak yang diberi untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah disiapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan penerima imbalan pembayaran menurut jumlah yang telah ditetapkan.⁴⁵

Penunjukan sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi tugas dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian pemborongan, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subkontraktor berdasarkan perjanjian khusus. Pemborong dapat berbentuk perorangan atau pun badan hukum, baik pemerintah maupun swasta.⁴⁶

⁴⁵ Aldian Hariikhman. "Prosedur Pembuatan Perjanjian Pemborongan Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah melalui pengadaan langsung", <http://Aldianharikhman.blogspot.com/2010/08/prosedur-pembuatan-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 September 2018.

⁴⁶ Apit Nurwidjanto. "pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Puri Rencana Mulia Persada di Semarang". Program Pasca Sarjana, Semarang; Fakultas Hukum

Persyaratan bagi pemborong / penyedia jasa konstruksi untuk ikut serta dalam pengadaan barang / jasa pemerintah di atur dalam pasal 11 Kepres no. 80 Tahun 2003 *jo.* Pasal 19 Perpres No. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang /jasa;

b. Memiliki keahlian , pengalaman, kemampuan teknis dan manegertial untuk menyediakan barang/jasa;

c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan /atau direksi yang bertindak untuk dan atasnama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana ;

d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan NPWP terakhir, melampirkan *fhotocopy* tanda bukti terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan(PPh) tahun terakhir , dan *fhoto copy* surat setoran pajak (SPP) PPh pasal29 ;

f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/ jasa yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;

g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa ;

h. Tidak masuk dalam daftar hitam ;

⁴⁷Universitas Diponegoro 2007,eprints.undip.ac.id/15371/1/apit_nurwidjanto.pdf, diakses pada tanggal 10 September 2018.

⁴⁷Marthen H Tolle . *Op.Cit*, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- g. Khusus penyediaan barang / jasa perorangan persyaratan sama dengan diatas kecuali huruf “f”.

Selain itu terdapat larangan – larangan untuk pihak pemborong/ kontraktor sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (8) Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu :

- a. Pegawai negeri, Pegawai BI, Pengawas BHMN, BUMN / BUMD dilarang menjadi penyedia jasa (pemborong) kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara, BI , BHMN, BUMN atau BUMD.
- b. Penyedia jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia jasa .
- c. Terpenuhinya persyaratan penyedia jasa dinilai melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi oleh panitia / pejabat pengadaan.

3. Perencana (Arsitek)

Tugas perencanaan dalam pemborongan bangunan dilakukan oleh orang yang ahli yaitu arsitek / insinyur (engineer) . arsitek adalah seorang yang ahli dalam membuat rancangan bangunan yang memimpin konstruksi nya.⁴⁸ meskipun perencanaan tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian ini. Perencanaan dapat dari pihak dari pemerintah maupun swasta (konsultan perencanaan). Perencana merupakan peserta namun bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Perencanaanya mempunyai hubungan hukum dengan si pemberi kerja yang

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka , 1995

ditentukan atas dasar perjanjian tersendiri diluar perjanjian pemborongan. Hubungan kerja antara perencana dengan pemberi kerja pada pokoknya adalah bahwa perencana bertindak sebagai penasehat dan sebagai wakil boowheer (likang) dan melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan pekerjaan.⁴⁹

Adapun tugas perencana yaitu :⁵⁰

a. Sebagai Penasehat

Disini perencanaan mempunyai tugas membuat rencana biaya dan gambar bangunan sesuai dengan pesanan pemberi tugas. Hubungan pemberi tugas dengan perencana sebagai penasehat dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal. Dalam praktek perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal disebut dengan istilah seperti perjanjian perencana, perjanjian pekerjaan perencana.

b. Sebagai wakil

Disini perencana bertindak sebagai pengawas, dengan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Hubungan antara pemberi tugas dengan perencana sebagai wakil dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUHPerdota).

Sebagai wakil atau si kuasa , perencana dapat diberhentikan sewaktu-waktu (Pasal 1792 – 1819 KUHPerdota). Perencana dapat menunjukkan orang lain untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan , hal ini dikatakan ada substansi. Tentang substansi itu dalam pasal 1803 KUHPerdota ditentukan sebagai berikut: si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

⁴⁹J.A Mukumoko. *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan* , Jakarta : CV . Gaya Media Pratama , 1986. Hal. 2.

⁵⁰Djumialdji, *Op.cit.* Hal. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jika ia tidak diberikan hak untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

Jika hak itu telah diberikan kepadanya tanpa pengikatan seseorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seseorang yang tak cakap atau tak mampu.

4. Pengawas (direksi).

Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborong. Disini pengawas dengan keahliannya bertugas mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta pelaksana akhir atas hasil pekerjaan sebelum penyerahan.⁵¹ selain itu ,pada waktu pelelangan pekerjaan dilangsungkan, pengawas (direksi) bertugas sebagai panitia pelelangan. Adapun tugas dari panitia pelelangan yaitu :⁵²

- Mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan ;
- Memberi penjelasan mengenai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pemborongan-pemborongan / pembelian dan untuk membuat berita acara penjelasan;
- Melaksanakan pembukuan surat-surat penawaran dan membuat berita acara pembukuan surat penawaran;
- Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang , serta membuat berita acara hasil pelelangan dan sebagainya.

⁵¹Djumialdji, *Op.cit.* h.34.

⁵²Djumialdj, *Op.cit.* h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis – jenis perjanjian pemborongan

Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang kontak pengadaan barang/jasa atau disebut juga dengan perjanjian pemborongan dibagi atas beberapa jenis. Dilihat dari bentuk imbalannya, maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis, yaitu :⁵³

Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

2. Harga satuan, yaitu kontrak pengadaan barang/ jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Gabungan *Lump Sum* dan harga satuan, yaitu kontrak yang merupakan gabungan *lump sum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Terima jadi (*turn key*) adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan / konstruksi , peralatan dan

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan criteria kinerja yang telah ditetapkan.

Presentase, yaitu kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dengan nilai pekerjaan fisik konstruksi / pemborongan tersebut.

Sedangkan ditinjau dari jangka waktu pelaksanaannya, maka kontrak pengadaan barang / jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis , yaitu : ⁵⁴

1. Tahun Tunggal, yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat danaanggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
2. Tahun jamak, yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh :
 - a. Menteri keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN.
 - b. Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi,
 - c. Bupati/walikota untuk pengadaan yang dibiaya APBDKab/Kota.

Ditinjau dari jumlah pengguna barang/jasa, maka dapat dibedakan dalam ⁵³(tiga) jenis, yaitu :

- a. Kontrak pengadaan tunggal, yaitu kontrak satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

⁵⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Kontrak pengadaan bersama, yaitu kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Kontrak payung (*framework contract*), yaitu merupakan kontrak harga satuan dengan pemerintah dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/ Daerah/Institusi lainnya).

D. Asas-Asas Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁵

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak itu sendiri atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

⁵⁵ Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pustaka Mahardika), 1960

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas *Fakta Sun Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata.⁵⁶

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya

⁵⁶ Munir Fuady, *pengantar hukum bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa kontrak ini tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut, maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak

⁵⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

terpenuhi maka suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak.

E. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.⁵⁸

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

F. Wanprestasi

- a. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.² Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

⁵⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Afika,2010),h.43

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

- b. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach/force majeure*)
2. Karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat kelalaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan, dalam bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak dikatakan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur menyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling). Somasi itu semacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lisan kepada debitur kapan selambat-selambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang malalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Sebaiknya dilakukan secara tertulis guna mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut sampai berlanjut kepengadilan. Dalam keadaan tertentu somasi tidak terlalu dilakukan, apabila debitur telah mengakui kesalahannya.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁶⁰

⁶⁰ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja.
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁶¹

Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Perikatan tetap ada.
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.⁶²

⁶¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 30

⁶² Salim H.S, *Hukum Kontrak Toeri & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Afika, 2009), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUH Perdata).

Menurut undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur.
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”⁶³

⁶³ Ahmadi Miru, *Op Cit*, h.13

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan perjanjian kerja antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid di Pasar Minggu Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai yang terdapat pasal 1338 KUH perdata kegiatan tersebut didahului dengan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian yang sudah disepakati, dengan isi perjanjian terdapat ketentuan bahwa jangka waktu pembangunan masjid tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Kemudian juga disebutkan biaya pembangunan dan prosedur pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta masa pemeliharaan setelah pembangunan tersebut dilaksanakan. Ternyata dalam pembangunan tersebut tidak selesai sebagaimana yang sudah diperjanjikan, sehingga pihak kedua sudah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelesaian sengketa wanprestasi antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid di Pasar Minggu Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, karena diakibatkan pembangunan tersebut terlambat diselesaikan oleh pihak kedua, dan hal ini sudah ditegur oleh pihak pertama (pemberi kerja). Penyelesaian perselisihan ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan dicapai kesepakatan bahwa jangka waktu pembangunan tersebut ditambah selama 2 (dua) bulan, dan pihak kedua tetap bertanggungjawab terhadap penyelesaian pembangunan masjid tersebut.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kedua selaku penerima kerja (pemborong) harus benar-benar dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Sebagaimana asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik, untuk menghindari tuntutan dan pembayaran ganti rugi dari pihak lain atau pihak pemberi kerja.
2. Bagi pihak pertama (pemberi kerja) harus benar-benar dapat mengawasi dan memantau pekerjaan pembangunan masjid yang dilakukan oleh pihak kedua tersebut, agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan bestek dan gambar

yang sudah ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh memang benar-benar sesuai dengan keinginan yang sudah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Faudy Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Sunggono bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2011

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita, 1985

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta :PT. Intermasa, 2010

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

B. UNDANG-UNDANG

Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956

SURAT PERJANJIAN KERJA

PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASJID DI PASAR MINGGU KM. 20

ANTAR

Nama : Rita Yani Iyan
Alamat : Jl. Balam Sakti No. 7, Kel. Simpang Baru,
Kec. Tampan- Pekanbaru

DENGAN

Nama : Adi Vaya, ST
Alamat : Jl. Merak Sakti Gg. Darussalam No. 2,
Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 18 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan lain-lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini SENIN, Tanggal 18 sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas
...../03/2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Yani Iyan
Alamat : Jl. Balam Sakti No. 7, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan
Pekanbaru

Bertindak sebagai dan atas nama Pribadi yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Nama : Adi Vaya, ST
Pekerjaan : Arsitek
Alamat : Jl. Merak Sakti Gg. Darussalam No. 2, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan
Pekanbaru

Bertindak sebagai kontraktor dan atas nama Pribadi yang dalam hal ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan untuk saling mengikat diri mengadakan
perjanjian kerja untuk **PEKERJAAN Pembangunan Masjid di Pasar Minggu KM. 20** untuk
selanjutnya diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tempat Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan
Pembangunan Masjid di Pasar Minggu KM. 20 yang berlokasi di Tapung, Kab. Kampar,
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah
disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 2

Waktu Pelaksanaa Pekerjaan

Pekerjaan seperti yang tersebut dalam Pasal 1 akan dimulai pada hari SENIN, Tanggal
..... Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan harus diselesaikan dalam waktu
maksimal 120 (seratus Dua Puluh) hari kalender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3

Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama.

PIHAK KEDUA harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja (bestek) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

PIHAK PERTAMA harus memberikan detail spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB.

PIHAK PERTAMA harus memberikan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 4

Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Masjid di Pasar Minggu KM. 20 tersebut adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Harga borongan tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerja dan keuntungan kontraktor.

Pasal 5

Prosedur Penagihan dan Pembayaran

Prosedur pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dalam Pasal 4 akan dilakukan secara bertahap, sebagai berikut :

- * Pembayaran Pertama
DP dibayarkan 30%, sebesar Rp. 111.000.000,00
- * Pembayaran Kedua
Dibayarkan 25%, sebesar Rp. 92.500.000,00
- * Pembayaran Ketiga
Dibayarkan 25%, sebesar Rp. 92.500.000,00
- * Pembayaran Keempat
Dibayarkan 20%, sebesar Rp. 74.000.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6

Masa Pemeliharaan

1. Masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 (tiga) bulan, sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani.
2. Pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, KEDUA BELAH PIHAK akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang berakhir.
3. Serah terima pekerjaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Pekerjaan Tambah Kurang

1. Jika dikemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material bangunan atau gambar kerja, maka hal tersebut akan diatur dalam addendum tersendiri.
2. Setiap pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang harus melalui dan dari PIHAK PERTAMA.
3. Pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang yang melalui PIHAK KEDUA akibat masalah teknis, harus diberitahukan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Pengawas Lapangan

1. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu mendatangi, mengawasi, memeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada setiap pekerja lapangan (tukang atau mandor) yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
2. PIHAK KEDUA harus bersedia jika diminta mendampingi oleh PIHAK PERTAMA dalam pengawasan pekerjaan di lokasi proyek.

Pasal 9

Sub Kontraktor

Keseluruhan pekerjaan merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, oleh karena itu tidak diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA atau orang lain diluar Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 10

Force Majeur

1. Yang dimaksud keaddah Force Majeur adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, dll) yang bisa menyebabkan terganggunya jalannya proses konstruksi.
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang moneter (devaluasi) atau kenaikan harga BBM yang mengakibatkan proyek tersebut terganggu secara teknis maupun anggaran biaya.
 - c. Peperangan atau huru-hara yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan.
2. PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkan paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak peristiwa tersebut terjadi, jika tidak maka akan dianggap tidak terjadi force majeure.
3. Jika terjadi force majeure, PIHAK KEDUA harus memberikan itikad baik mengenai kelanjutan proyek.
4. Dalam keadaan yang disebutkan dalam Pasal 1, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan keberlanjutan proyek.

Pasal 11

Sanksi – Sanksi

1. Keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 10 ayat 1.
2. Apabila PIHAK PERTAMA lalai atau terlambat membayar termin kepada PIHAK KEDUA atas pekerjaan yang sesuai prosedur yang benar, maka PIHAK KEDUA berhak secara sepihak menghentikan jalannya proyek dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA (secara tertulis) sampai batas waktu yang ditentukan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBAGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”, yang ditulis oleh:

Nama : SULAIMAN
NIM : 11327106406
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Magfirah.MA

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Basir, S.HI., MH

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus,S.Ag

NIP. 19750801 200701 1023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama	: Sulaiman
Nim	: 11327106406
Tempat/tanggal lahir	: Benteng, 04 September 1995
Program studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Universitas	: Uin Suska Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penyelesaian sengketa wanprestasi antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid al Ikhlas di Pasar Minggu Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar"** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari telah terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Maret 2020
Yang membuat pernyataan


SULAIMAN
11327106406



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SULAIMAN

NIM : 11727106406

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antar Pemborong Dengan Donatur Pada Pembangunan Masjid Al Ikhlas Di Pasar Minggu Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Kampar*

Pembimbing : Akbar, SHI, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 April 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
KANTOR KEPALA DESA BENCAH KELUBI

Alamat: Jl. Poros Bencah kelubi Kode Pos 28464

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/Pem/BK/II/2019

Kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung kabupaten Kampar Dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Sulaiman
Nim/KTP : 11327106406
Fak/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Universitas : Uin Suska Riau
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Ujung-Pekanbaru
Judul Penelitian : "PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR".

Bahwa yang bersangkutan di atas **BENAR** kiranya telah melaksanakan kegiatan Riset/Penelitian di Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk menyelesaikan Studi Akhir Strata satu.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Bencah Kelubi, 13 Maret 2019

Kepala Desa Bencah Kelubi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1512/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : SULAIMAN
NIM : 11327106406
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **10 JANUARI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Februari 2019

Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul: penyelesaian sengketa wanprestasi antara pemborong dengan donatur pada pembangunan masjid al ikhlas di pasar minggu kecamatan tapung kabupaten kambar.

Ditulis oleh saudara:

Nama : SULAIMAN
NIM : 11327106406
Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 12 desember 2018
Narasumber : FIRDAUS. S.H, M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Rosmianti, S.Ag.

NIP.19740910 200312 2 003

Pekanbaru,
Narasumber

Firdaus., SH, MH

NIP.19661002 199403 1 002

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang

Sultan Hassanudin Islamic University of Sultan Hassanudin

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/18174
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.PP.00.9/800/2019 Tanggal 28 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

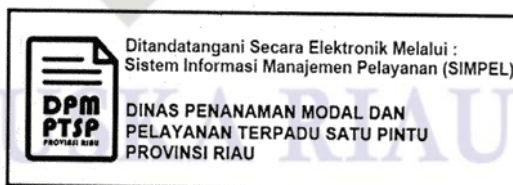
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SULAIMAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11327106406 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL IKLAS DI PASAR MINGGU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BENCAH KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terdapat untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Februari 2019



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Penulis Bernama Sulaiman Lahir di Benteng Pada Tanggal 4 September 1995 Anak Kelima Delapan Bersaudara dari pasangan Bapak Rafik(Alm) dengan Ibu Norma. Pada tahun 2002 penulis memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Islamiah di sungai Intan desa prt kaddas. Lulus pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Benteng Kecamatan Sungai Batang. Lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di madrasah aliyah darud da'wah wal irsyad (DDI) benteng kecamatan sungai batang. Lulus pada tahun 2013, berkat doa dan restu orang tua atas izin ALLAH SWT,penulis Melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan program Study Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang di PT PERSERO PELINDO I Kantor cabang kabupaten tembilahan inhil-riau selama dua bulan. Penulis juga melaksanakan kulia kerja nyata (KKN) di kelurahan pangkalan tujuh kabupaten indra giri hilir provinsi riau,dan penulis juga mengikuti organisasi HMI MPO,IPPMSB,LDK.

Atas berkat rahmat ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENYELSAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PEMBORONG DENGAN DONATUR PADA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS DI PASAR MINGGU KECAMTAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR. Di bawah arahan dan bimbingan langsung oleh Bapak Ilham Akbar .SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum tanggal 16 maret 2020, penulis menyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)